

LINGKUNGAN HIDUP DAN KEAMANAN NASIONAL: REDEFINISI KONSEP KEAMANAN DAN KEDAULATAN NASIONAL

Dafri Agussalim* dan Armaidly Armawi**

Menjelang akhir abad ke tiga sebelum masehi Kaisar Qin Shi Huang membangun tembok sepanjang 6.000 km di daratan China. Tembok yang kemudian dikenal dengan nama The Great Wall itu dimaksudkan untuk melindungi keamanan dan kedaulatan teritorial kekaisaran China dari serangan bangsa barbar dari utara negeri itu. Setelah Perang Dunia II (PD II) berdiri tembok lain yang dikenal dengan nama Tembok Berlin yang memisahkan Jerman Barat dan Jerman Timur waktu itu. Tujuan didirikannya tembok kedua ini pada dasarnya sama, yaitu untuk melindungi keamanan dan kedaulatan Jerman Timur yang sosialis dari ancaman invasi atau infiltrasi dari Jerman Barat yang kapitalis.

Kini kedua tembok tersebut memang sudah kehilangan fungsi aslinya. Bahkan Tembok Berlin sudah hancur berantakan dan tinggal sebagai hiasan museum atau tempat wisata semata. Akan tetapi, tembok sebagai metafora bagi keamanan dan kedaulatan suatu negara terus berlangsung dan berkembang dalam imajinasi manusia.

Walaupun manifestasinya berbeda, dalam benak kebanyakan pemimpin dunia terus berkembang pemikiran bagaimana caranya agar dapat membangun 'tembok' yang lebih besar, lebih kokoh dan lebih superior secara teknologi sehingga lebih tangguh dalam menangkal serangan lawan.

* Drs. Dafri Agussalim, M.A., Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.

** Drs. Armaidly Armawi, M.Si., Pengajar Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada.

Keduanya Staf Peneliti Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian Universitas Gadjah Mada.

Di zaman Ronald Reagan berkuasa, misalnya, Amerika Serikat (AS) berusaha membangun 'tembok' pengaman melalui apa yang dinamakan program SDI (*Strategic Defence Initiative*).

Dengan program ini diharapkan Amerika mampu membendung serangan misil lawan, meningkatkan ketahanan nasional, dan pada akhirnya, menjamin kedaulatan dan keamanan nasionalnya serta meningkatkan prestise negeri tersebut di mata dunia.

Sementara itu di belahan bumi lainnya berbagai negara terus sibuk membangun 'tembok-tembok' yang lain. Manifestasinya bisa berupa penumpukan senjata canggih, diplomasi dan perjanjian atau melalui pemupukan kekuatan lainnya seperti ekonomi, teknologi dan lain-lain. Walaupun manifestasinya berbeda-beda, tetapi tujuan pembangunan dari 'tembok-tembok' baru tersebut tetap sama yaitu untuk mempertahankan keamanan dan kedaulatan mereka serta prestise dari masing-masing negara tersebut. Tulisan ini akan melihat jenis keamanan dan kedaulatan yang mana yang diwakili oleh metafora 'tembok' tersebut, dan sejauh manakah validitasnya dewasa ini, khususnya jika dikaitkan dengan isu lingkungan hidup.

Realis Tradisional

Konsep keamanan dan kedaulatan yang diwakili oleh metafora 'tembok' tersebut di atas merupakan konsep keamanan dan kedaulatan nasional tra-

disional yang sangat dipengaruhi oleh pemikiran realis yang berkembang di Barat. Pandangan ini pada umumnya sangat mengedepankan pendekatan yang bersifat reduksionis, non-sistemik dan pragmatis terhadap subjek permasalahan. Pandangan ini menitikberatkan asumsi filosofinya pada politik kekuatan (*power politics*): konflik, paksaan, negara sebagai aktor tunggal, dan keamanan negara sebagai suatu tujuan.

Menurut pandangan kaum realis ini, hubungan internasional merupakan hasil dari kebijaksanaan luar negeri yang ditujukan untuk memperkuat keamanan nasional yang didefinisikan dalam terminologi militer, territorial dan ideologi domain. Tujuan-tujuan lain memang dikejar untuk dicapai oleh aktor-aktor internasional, tetapi tujuan-tujuan tersebut termasuk *low politics*, dan oleh karena itu ditempatkan sebagai prioritas yang rendah dalam kebijaksanaan negara, dan oleh karenanya memiliki konsekuensi yang kecil terhadap hubungan internasional (Merrit and Russet, 1981: 149).

Hubungan internasional secara fundamental merupakan proses konflik yang bersifat *zero-sum game matrices*. Konflik, oleh karena itu, merupakan ciri utama dari hubungan internasional.

Sikap cenderung melakukan paksaan merupakan kebiasaan yang sering digunakan untuk mempengaruhi pihak lawan. Pengaruh dalam hubungan internasional tersebut terutama sekali dicapai melalui pengerahan kekuatan, khususnya kekuatan militer (Levy, 1988: 56).

Mengingat hubungan internasional bersifat anarkis, maka menurut kaum realis ini, setiap negara berdaulat harus mampu bertumpu pada kekuatannya sendiri dalam hal memelihara keamanan dan kepentingan mereka lainnya. Ini berarti, setiap negara adalah penentu dan pelindung utama terhadap keamanan dan kepentingannya. Dengan kata lain, dalam lingkungan yang penuh dengan ancaman semacam itu, setiap negara merasa wajib untuk memelihara dan mengembangkan tingkat minimal dari keamanan dan kepentingan masing-masing lainnya. Alat yang paling utama yang diyakini sebagai penjamin atau pemelihara keamanan dan kepentingan tersebut adalah akumulasi dari kekuatan militer, kekuatan ekonomi dan pembentukan aliansi.

Dalam pemikiran kaum realis keamanan nasional (*national security*) dipandang sebagai sinonim dengan kepentingan nasional (*national interest*), dan dikonotasikan hampir secara ekse-

klusif sebagai isu strategi dan pertahanan. Kepentingan ekonomi dan kesejahteraan, termasuk lingkungan hidup, yang sebenarnya merupakan unsur penyokong dinamis bagi keamanan internasional, umumnya hanya dipandang penting dan relevan jika menyumbang bagi kekuatan pertahanan atau militer (Dupont, 1990: 2).

Tidak heran oleh karena itu jika secara tradisional kaum realis mendefinisikan *security* sebagai bebas dari bahaya atau aman dari ancaman. Dalam kerangka politik internasional yang bersifat *state-centric system*, secara tradisional pula keamanan nasional umumnya dikaitkan langsung pada terminologi militer. Keamanan nasional selanjutnya diterjemahkan sebagai kemampuan (militer) suatu negara untuk menangkal invasi militer pihak lain atau negara lain. Dalam pandangan realis, kekuatan militer, yang kemudian berkembang dengan kekuatan lainnya, dipandang sebagai alat yang paling ampuh dalam mengatasi masalah hubungan internasional yang anarkis. Kekuatan (*military force*), oleh karena itu, merupakan *the final arbiter of disputes* (Garnett, 1975: 9-12).

Dengan demikian, ringkasnya, keamanan nasional merujuk ke pengertian pencegahan perang (*war prevention*) atau

belakangan manajemen perang (*war management*). Titik fokusnya adalah pada aspek militer dari keamanan nasional, dan kurang memberikan perhatian pada interpretasi-interpretasi alternatif terhadap keamanan nasional atau terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengannya.

Dari definisi seperti tersebut di atas, jelaslah bahwa konsep *security* lebih banyak dipakai dalam artian negatif ketimbang positif. Konsep *security* lebih ditujukan untuk pemakaian terbatas pada proteksi terhadap ancaman atau bahaya daripada sebagai sesuatu yang mendorong terciptanya suatu keadaan yang dikehendaki atau keadaan yang lebih baik. Keamanan didefinisikan sebagai reaksi terhadap ancaman, dan biasanya ancaman yang dimaksud adalah ancaman terhadap negara, terutama sekali ancaman militer.

Keamanan, dengan demikian, tidak lagi ditempatkan atau dikaitkan dengan nilai dasar kemanusiaan universal, tetapi diletakkan pada kekuatan militer dari segmen masyarakat bangsa tertentu saja. Keamanan, secara implisit, adalah upaya dan tujuan serta milik suatu bangsa yang kuat saja, bukan untuk dan dari keseluruhan umat manusia di dunia ini. Konsep *national security* ini sarat dengan muatan ideologi dan politik. Hal ini ter-

cermin, misalnya, dari semboyan "lebih baik mati daripada merah" (*Better Dead than Red*).

Konsep semacam ini berasal amat dipengaruhi oleh pemikiran realis yang berkembang di Amerika Serikat (AS) sejak tahun 1940-an. Hal ini berkaitan erat dengan terjadinya perubahan dramatis politik internasional akibat Perang Dunia II. Penyerangan terhadap Pearl Harbour oleh Jepang, yang telah memicu keterlibatan Amerika Serikat dalam PD II, telah meyakinkan AS bahwa politik isolasionis yang diterapkannya sudah tidak memadai lagi. Lebih dari itu, yang lebih penting, kejadian tersebut telah menyadarkan AS bahwa kekuatan dan kesiapsiagaan militer sangat penting artinya untuk menjaga keamanan dan kedaulatan nasionalnya.

Berkembangnya ekspansi kepentingan politik dan ekonomi Amerika Serikat, yang berarti juga membuka peluang bagi berkembangnya berbagai ancaman baru, semakin menguatkan pandangan ini. Munculnya Perang Dingin antara tahun 1945 sampai akhir 1980-an, semakin memperkokoh tema-tema keamanan dan kedaulatan nasional tersebut dalam politik Amerika Serikat, terutama *vis a vis* bekas Uni Soviet.

Sejalan dengan meluasnya pengaruh politik, ekonomi, ide-

ologi, militer dan budaya Amerika Serikat di dunia, pendekatan realis yang menitikberatkan pada perspektif keamanan militer ini pada akhirnya mempengaruhi negara-negara lain di dunia, termasuk negara-negara dunia ketiga seperti Indonesia. Persepsi dan konsepsi semacam ini mempengaruhi psikologi masyarakat dunia dan tingkah laku mereka. Demikian dominannya pendekatan Realis ini, sehingga hampir tidak ada tempat bagi pendekatan lain dalam pemikiran keamanan nasional suatu negara. Ancaman invasi militer dan subversi, misalnya, hampir menjadi bagian permanen dari psikologi kebanyakan pemimpin negara-negara di dunia. Mereka ini pada umumnya selalu dihantui oleh perasaan tidak aman atau terancam, bahwa selalu ada perasaan tidak aman secara permanen, baik dari ancaman pihak luar maupun dari ancaman internal.

Untuk mengatasi hal itu, maka mereka berlomba-lomba mempersiapkan penangkalnya dengan membangun kekuatan militer dan persenjataan. Asumsinya adalah bahwa keamanan akan terjamin jika kita mempunyai kekuatan yang cukup. Dik-tum yang sangat populer di antara mereka adalah "jika ingin damai bersiaplah untuk perang". Dominannya pendekatan

keamanan atau titik berat pada strategi militer ini terlihat jelas dari penumpukan senjata yang terus meningkat di seluruh dunia sampai saat ini. Hampir sepanjang abad ke-20 ini negara-negara di dunia telah terkungkung atau terperangkap pada konsep dan definisi keamanan dan kedaulatan nasional seperti ini.

Ancaman Baru

Dewasa ini pengaruh pendekatan Realis terhadap masalah keamanan dan kedaulatan dirasakan masih tetap dominan di kebanyakan negara-negara di dunia. Isu-isu mendasar mengenai perang dan damai masih tetap merupakan bagian dari kehidupan umat manusia sehari-hari. Akan tetapi lambat laun muncul isu-isu dan persoalan baru non-militer yang mengingat dampak jangka panjangnya bagi eksistensi umat manusia secara keseluruhan amat luas, juga menuntut perhatian dan penanganan yang tidak kalah seriusnya. Akibatnya, mau tidak mau, konsep keamanan dan kedaulatan nasional tradisional juga harus ditinjau kembali. Perkembangan zaman mengharuskan adanya redefinisi kembali terhadap konsep keamanan nasional tradisional tersebut.

Kecenderungan berkembangnya konsep keamanan ter-

sebut sebenarnya sudah berlangsung sejak lama. Sejak tahun 1970-an, misalnya, konsep keamanan nasional bangsa-bangsa di dunia berkembang, di samping tetap menitikberatkan bidang militer dan persenjataan, meliputi pula bidang ekonomi. Pergeseran ini ditandai dengan kenyataan bahwa ekonomi suatu negara, seperti halnya ekonomi Amerika Serikat yang sebelumnya dianggap super kuat, tidak lagi merupakan kekuatan independen, tetapi dipengaruhi dan ditentukan oleh kebijaksanaan ekonomi negara-negara lainnya. Permasalahan ekonomi yang muncul di Jepang, Jerman, Inggris dan negara-negara lain di Asia dan Eropa, misalnya, terbukti dapat mengancam perekonomian Amerika Serikat, dan sebaliknya. Definisi keamanan nasional suatu negara, oleh karenanya, termasuk pula kemampuan ekonomi negara tersebut untuk berkompetisi di pasar global serta akses ke sumber-sumber yang diperlukan.

Sejak akhir tahun 1980-an agenda diplomatik dunia internasional semakin berkembang lagi dan semakin kompleks. Sejak itu jumlah maupun jenis isu yang ditangani oleh para diplomat di dunia jauh melampaui jumlah dan jenis isu yang secara tradisional mereka tangani sebelumnya. Muncul masalah-masalah

baru seperti peredaran narkotik, kejahatan ekonomi, masalah pengungsi, penyebaran penyakit menular dan lain-lain. Konsekuensinya, diplomasi menjadi semakin multilateral dan dalam waktu yang sama intrusi pihak eksternal terhadap masalah internal dari negara lain sulit dihindarkan bahkan sudah menjadi semacam kebiasaan umum.

Di antara persoalan-persoalan baru tersebut yang terpenting, tetapi kurang mendapatkan perhatian kita, adalah munculnya masalah lingkungan hidup. Ancaman baru akibat ulah manusia ini bermacam-macam ragamnya. Mulai dari perusakan lapisan ozon yang sangat esensial untuk melindungi manusia dan tumbuhan dari radiasi ultra violet sinar matahari; peningkatan karbon dioksida yang dapat menyebabkan efek *greenhouse* dan perubahan iklim global; hujan asam, peningkatan kadar kimia di permukaan air sampai radioaktif dan berbagai jenis polusi lainnya, baik di air, tanah maupun udara yang kesemuanya dapat menyebabkan munculnya berbagai masalah kesehatan dan lingkungan seperti penyakit kanker, gangguan genetik, lenyapnya permukaan tanah yang subur untuk pertanian yang amat diperlukan untuk mengatasi kelaparan bagi jutaan orang.

Bersamaan dengan itu pula bumi kita terancam oleh lenyapnya jutaan jenis tumbuh-tumbuhan dan binatang akibat over industrialisasi, dehumanisasi atau penebangan hutan secara membabi buta, polusi, atau bentuk-bentuk tindakan lainnya yang terencana. Kesemuanya itu, pada akhirnya, telah menyumbang menipisnya sumber air tanah dan pengurangan produksi oksigen oleh bumi dengan dampak lanjutannya adalah meningkatnya ancaman karbon dioksida yang pada akhirnya mengancam kestabilan iklim dan cuaca global.

Ancaman baru semacam ini mengharuskan kita untuk mengubah cara berpikir kita mengenai keamanan. Ancaman yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan tidak seperti ancaman yang disebabkan oleh militer, politik, ekonomi dan ideologi. Ia kadang-kadang tidak dapat diidentifikasi secara cepat atau jelas sebagaimana ancaman militer dan ekonomi, sehingga dalam penyelesaiannya sering sekali tidak mudah; membutuhkan waktu, tenaga dan biaya yang sangat besar.

Ancaman jenis baru ini juga tidak dapat didefinisikan secara ideologi dan tidak dapat diukur dengan kekuatan militer atau persenjataan. Ia juga tidak bisa diselesaikan dengan kekuasaan

politik atau kekuatan militer semata-mata. Dominasi tidak akan membawa arti apa-apa. Suatu negara yang mempunyai kekuasaan atau kekuatan yang besar belum tentu menjamin ia terhindar atau dapat mengatasi ancaman baru ini. Hujan asam, menipisnya lapisan ozon, atau meningkatnya panas bumi, misalnya tidak bisa diselesaikan dengan kekuatan militer atau ekonomi semata, walau negara tersebut sehebat Amerika Serikat, Jepang dan negara-negara Eropa Barat sekalipun. Banjir besar yang melanda Amerika Serikat dan gempa bumi di Jepang dan India beberapa tahun terakhir ini, merupakan contoh yang nyata bahwa tidak ada negara yang kebal terhadap ancaman lingkungan.

Ironisnya, sampai sekarang keamanan lingkungan hidup (*ecological security*), yang justru sebenarnya merupakan keamanan seluruh umat manusia, hampir tidak pernah dimasukkan sama sekali dalam matrik keamanan nasional kebanyakan negara di dunia. Kalau pun hal itu ada, maka prioritasnya jauh di belakang prioritas kepentingan politik, militer dan ekonomi. Kita sendiri telah lama mempunyai kementerian lingkungan hidup. Akan tetapi masalah ini cenderung untuk ditempatkan sebagai masalah tersendiri yang

tidak ada sangkut pautnya secara langsung dengan masalah keamanan nasional kita. Dengan kata lain, sejauh ini tema lingkungan hidup ini belum secara eksplisit dimasukkan atau dianggap sebagai bagian atau unsur yang penting dalam sistem pertahanan dan keamanan nasional kita sebagaimana halnya unsur-unsur ekonomi, politik, sosial, budaya serta pertahanan dan keamanan dalam artian militer. Masalah lingkungan belum secara eksplisit dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan dan kedaulatan negara kita.

Tidak heran oleh karenanya kita sering menyaksikan masalah lingkungan ini sering harus kalah (atau tepatnya dikalahkan) bila ia berhadapan dengan kepentingan ekonomi, politik atau kepentingan lain-lainnya. Padahal bahaya yang disebabkan kerusakan lingkungan ini adalah merupakan bahaya dan ancaman yang riil dewasa ini dan dampak jangka panjangnya jauh lebih berbahaya dari ancaman invasi militer. Banyak para ahli yang percaya bahwa kita sekarang sedang menuju ke pintu krisis masa depan yang jauh lebih berbahaya daripada seluruh bentuk ancaman yang pernah dihadapi oleh umat manusia selama ini yaitu suatu ancaman yang global sifatnya, tak

terhindarkan dan tak terduga kapan datangnya dan seberapa besar dampaknya.

Kedaulatan Nasional

Bergesernya bentuk ancaman seperti dijelaskan di atas dengan sendirinya mengubah konsep kedaulatan nasional suatu negara. Pada umumnya kedaulatan (*sovereignty*) sebagaimana yang kita fahami dan anut selama ini merujuk ke suatu teori politik yang berhubungan dengan otoritas tertinggi dalam proses pembuatan keputusan dalam suatu negara. Dalam konteks hubungan antara negara dan warganegara secara individual (kedaulatan internal), konsep kedaulatan biasanya didefinisikan sebagai aturan untuk menjaga tata tertib, termasuk siapa yang mempunyai kekuasaan untuk membuat atau mengubah hukum dalam wilayah tertentu. Dalam konteks hubungan atau politik internasional (kedaulatan eksternal) kedaulatan merujuk ke pengertian kebebasan suatu negara dari campur tangan atau kontrol negara lain.

Dewasa ini konsep kedaulatan tradisional seperti ini terbukti tidak dapat lagi dipertahankan secara absolut. Konsep kedaulatan seperti ini mulai dipertanyakan validitasnya, terutama sehubungan dengan munculnya

realitas baru seperti meningkatnya skala saling ketergantungan global di bidang ekonomi dan keuangan, teknologi, militer, kultur, dan yang paling penting, dampak perkembangan lingkungan hidup yang semakin memburuk. Batas-batas dan kedaulatan nasional tidak lagi dapat dipertahankan secara utuh dalam artian tradisional yang hanya meliputi kedaulatan teritorial, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Kini batas-batas nasional suatu negara lebih mirip membran yang dengan mudah dapat dilintasi aktivitas kehidupan kita dan bangsa atau negara lain di seluruh dunia. Kemajuan dan transparansi teknologi, ekonomi global dan saling ketergantungan ekologi menyebabkan konsep batasan negara dan kedaulatan tradisional menjadi usang.

Sehubungan dengan masalah lingkungan ada dua hal penting yang menyebabkan konsep kedaulatan nasional tersebut tidak bisa berlaku absolut lagi. Pertama, ancaman akibat kerusakan lingkungan hidup ini tidak mengenal batas-batas negara, suku, ras, ideologi, kekuatan militer dan sejenisnya. Ancaman jenis baru ini bersifat global dan tidak membedakan apakah suatu bangsa atau negara itu super power atau negara lemah, miskin atau kaya, kapitalis atau sosialis/

komunis, Barat atau Timur, Selatan ataupun Utara.

Dengan demikian konsep kedaulatan politik dan teritorial nasional suatu negara juga tidak berlaku. Dampak kebocoran reaktor nuklir di Chernobyl pada tahun 1986, misalnya, tidak hanya terbatas pada negara Uni Soviet saja, tetapi juga melampaui batas negara itu, menembus kedaulatan dan batas negara-negara lain di Eropa Barat, Swedia, Norwegia dan lain-lain. Polusi yang berasal dari industri-industri di Amerika Serikat menyebar melampaui batas negara tersebut masuk ke wilayah Meksiko ataupun Kanada. Demikian juga dengan kecelakaan tanker asing di selat Malaka beberapa tahun lalu telah menimbulkan masalah bagi kita dan juga negara tetangga tanpa menghiraukan batas-batas kedaulatan negara masing-masing.

Contoh kasus yang kongkret dan paling baru adalah masalah kebakaran hutan di Indonesia baru-baru ini. Dampak dari kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan tersebut telah menimbulkan masalah bagi bukan saja Indonesia tetapi juga bagi negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Philipina. Kabut asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan tersebut telah merugikan beberapa negara tetangga, baik se-

cara ekonomi maupun kesehatan. Akibat asap tebal yang menyelimuti udara teritorial negara-negara tersebut, misalnya, Indonesia, Malaysia dan Singapura terpaksa menghentikan aktivitas penerbangan udaranya. Ini berarti secara ekonomi merupakan kerugian yang besar. Belum lagi biaya yang harus dikeluarkan untuk mengatasi masalah itu, seperti biaya pengiriman pasukan pemadam kebakaran ke lokasi, biaya pengungsian dan lain-lainnya. Sementara itu, peristiwa kebakaran tersebut juga telah menyebabkan terganggunya pernapasan ribuan orang, baik di Indonesia, Malaysia maupun di Singapura.

Kedua, solusi terhadap masalah lingkungan ini mengharuskan kerjasama daripada kompetisi dan kekerasan. Oleh karena masalah lingkungan tidak mengenal batas-batas negara atau pun kedaulatan teritorial dan politik suatu negara, maka penyelesaiannya pun menuntut cara-cara yang melampaui batas-batas negara. Persoalan ini tidak dapat diselesaikan oleh tindakan unilateral suatu negara. Dalam mengatasi ancaman jenis baru ini dibutuhkan kerjasama global. Ia membutuhkan apa yang dinamakan *participatory politics* dan *voluntary restraint*. Secara simultan ancaman baru ini menuntut respon sistemik dan

lokal. Ia menuntut kerjasama yang sifatnya sangat luas, mulai dari individu, keluarga, negara sebagai *nation-states* dan global melalui organisasi internasional atau bahkan supra-nasional. Pemerintah suatu negara, demikian diungkapkan oleh Lester Brown, pada umumnya tidak cukup mampu dan siap untuk menangani ancaman yang bersifat non-militer di mana kekuatan militer menjadi tidak relevan lagi (Brown, 1988: 371).

Karena solusi terhadap persoalan lingkungan hidup ini mengharuskan secara global, maka dengan sendirinya persoalan ini akan menghadirkan ancaman yang sangat serius terhadap konsep kedaulatan nasional. Sebagai contoh, adanya kedua tuntutan di atas dengan sendirinya menggugurkan klaim yang sering muncul di negara dunia ketiga bahwa masalah lingkungan adalah masalah dalam negeri (kedaulatan) mereka masing-masing dan oleh karenanya tidak dapat dan tidak boleh dicampuri oleh pihak luar. Penebangan hutan yang membabi buta, misalnya, tidak lagi dapat kita klaim sebagai hak dan urusan kita semata, tetapi juga menjadi urusan semua umat manusia. Demikian juga halnya dengan polusi di negara-negara maju yang disebabkan oleh kegiatan industri mereka juga

menjadi masalah kita semua. Hal ini karena dalam jangka panjang dampak yang dapat ditimbulkan oleh seluruh masalah tersebut adalah global.

Barangkali ada benarnya pendapat yang mengatakan bahwa sebenarnya sekarang ini kita sedang berada pada titik di mana sejarah umat manusia dihadapkan pada keharusan untuk memikirkan secara lebih kritis dan memprioritaskan perhatiannya pada ancaman baru terhadap kelangsungan kehidupan umat manusia secara keseluruhan akibat ancaman dari kerusakan lingkungan hidup oleh umat manusia.

Penutup

Dari uraian di atas menjadi jelas bahwa ancaman terhadap keamanan nasional suatu negara tidak lagi layak dikonseptualisasikan semata-mata sebagai ancaman militer. Sekarang ini kita umat manusia secara keseluruhan dihadapkan pada suatu persoalan keamanan baru yang dapat mengancam eksistensi kita yaitu ancaman yang disebabkan oleh tindakan atau aktivitas jutaan atau milyaran orang yang telah bertindak secara tidak bijaksana terhadap lingkungan hidup sendiri.

Adanya perkembangan tersebut mengharuskan negara-nega-

ra di dunia, termasuk negara kita, untuk memperluas definisi keamanan dan kedaulatan nasional meliputi tidak saja kepentingan politik, ekonomi dan militer, tetapi juga meliputi sumberdaya-sumber daya, kependudukan dan lingkungan hidup. Oleh karena itu konsep keamanan dan kedaulatan nasional kita harus difahami dan dikembangkan dalam konteks yang interaktif dan dinamik ini. Munculnya fenomena baru di bidang lingkungan hidup membuat kita tidak mungkin lagi dapat menemboki diri masing-masing secara komplit seperti zaman dahulu. Adalah keliru besar jika kita masih beranggapan dan berpegang pada konsep keamanan dan kedaulatan negara tradisional dalam hal menghadapi masalah lingkungan hidup ini. *Bottom line* keamanan ekonomi, politik dan militer adalah fungsi integral dari lingkungan hidup kita. Sulit dibayangkan kita dapat melanjutkan pembangunan ekonomi secara wajar jika lingkungan hidup kita hancur. Demikian juga, keamanan militer menjadi tidak relevan jika bumi tidak lagi bisa menjamin kelangsungan hidup manusia. Lebih dari itu, kerusakan lingkungan hidup pada akhirnya akan mengancam eksistensi kehidupan kita yaitu kehidupan umat manusia secara keseluruhan.

Ringkasnya, kita semua sedang dihadapkan pada suatu persoalan penting dan mendasar: bagaimana mengamankan seluruh umat manusia dari ancaman kerusakan lingkungan yang sulit didefinisikan dan, ironisnya, sangat sedikit kita pahami. Ancaman tersebut berasal dari hasil perbuatan kita sendiri tetapi sulit untuk dihentikan bila kita tidak mengubah cara berpikir, bertindak kita.

Kepustakaan

- Brown, Lester, 1986, "Redefining National Security", *State of The World*, Norton & Co., New York.
- Dupont, Alan, 1990, "Australia and the Concept of National Security", *Working Paper*, The Strategic and Defence Studies Centre, The Australian National University, Canberra.
- Garnett, John, 1991, "Strategic Studies and Its Assumptions" in John Boylis (et al), *Contemporary Strategy: Theories and Policies*, Crom Helm, London.
- Levy, Jack, 1988, "Contending theories of War", in Kegley, Charles and Wittkopt, Eugene, *The Global Agenda: Issues and Perspective* (2nd. ed.), Random House, New York.
- Merritt, R.L., and Russett, B.M., 1981, *From National Development to Global Community*, Allen & Unwin, London.